

Pengemplang Pajak Ngak Beri Pelicin Rp 10 Juta

Direktorat Pajak Jateng Sandera Lima Wajib Pajak

MODUS PENGEMPLANG PAJAK

- Melakukan pembukuan ganda
- Buka beberapa rekening untuk tampung hasil penjualan, yang dilaporkan hanya satu rekening
- Membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya
- Menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya

SEMARANG, TRIBUN - Pengusaha pengemplang pajak, dalam aksinya, mengaku memberi uang pelicin puluhan juta rupiah kepada oknum pegawai pajak.

Hal itu diungkapkan seorang pengacara yang beberapa kali menangani kasus pengemplang pajak, M Taufik. Pengacara yang saat ini masih mendampingi tersangka pengusaha tekstil di Sukoharjo, Vinod Kumar Agarwal menuturkan ada

keterlibatan pegawai pajak yang meloloskan faktur fiktif. "Petugas pajak itu tentu hafal berapa omzet perusahaan wajib pajak (WP). Itu karena setiap transaksi ekspor selalu diaudit dan pegawai pajak mendapat laporannya. Kalau ada perbedaan, tentu auditor pajak itu sudah tahu ada kecurangan. Sebagai

KE HALAMAN 7



NEWS ANALYSIS | PAULINA RINI HASTUTI SE AKT MSI
DOSEN PERPAJAKAN FEB UNIKA SOEGUAPRANATA

Mereka Takut Dikorupsi

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pajak memberlakukan negatif insentif bagi pengemplang pajak. Salah satunya yakni dengan memberlakukan *gijzeling* atau paksa badan yang sebenarnya sudah dari dulu ada di dalam undang-undang. Namun baru-baru ini pelaksanaannya dipertegas dan dikuatkan dengan eksekusi para penunggak atau pengemplang pajak.

KE HALAMAN 7



Anda mempunyai komentar atau pengalaman soal mafia pajak? Sampaikan melalui akun facebook Tribun Jateng

Mereka Takut...

■ DARI HALAMAN 1

Sanksi *gijzeling* yakni penyitaan atas badan orang yakni wajib pajak (WP) dan biasanya di perusahaan yakni direktur perusahaan, berupa penahanan sampai WP membayar lunas pajak yang dikemplang.

Sekitar 70 persen penerimaan negara bergantung pajak. Target penerimaan pajak tahun ini cukup fantastis yakni Rp 1.294,258 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp 1.246,1 triliun atau meningkat Rp 48,158 triliun. Saya perkirakan bisa 90 persen dari target hingga akhir tahun. Pada 2014 lalu, penerimaan mencapai Rp 990,4 triliun.

Makanya Ditjen Pajak ngejar banget dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan karena beban penerimaan negara dibebankan ke pajak sangat besar. Apalagi ada proyek ambisus Presiden Jokowi untuk mem-

berikan fasilitas kesehatan gratis. Bahkan WP yang dulu hanya dosen biasa kalau SPTnya tidak wajar juga dikejar. Begitu juga, pengusaha UMKM yang meskipun pajak terutangnya sedikit tetap dikejar supaya masuk.

Pajak terutang UMKM memang hanya jutaan hingga puluhan juta, tapi perusahaan besar pajak terutang bisa ratusan juta sampai miliaran rupiah. Contohnya perusahaan modal asing di Jakarta, mereka mengemplang pajak sebesar Rp 6 miliar selama lima tahun.

Membayar pajak itu beban bagi perusahaan. Ketika perusahaan mendapatkan penghasilan dan memperoleh laba maka itu obyek pajak. Orang cenderung berpendapat, ini usaha saya sendiri, ini pekerjaan saya sendiri sehingga boleh bayar pajak tapi jangan terlalu banyak. Karena itu, WP akan

cenderung berusaha gimana caranya bayar pajak kecil. Mereka pun melakukan berbagai cara bahkan sampai melanggar aturan.

Kajian saya tentang persepsi WP tidak patuh bayar pajak lantaran pandangan negatif mereka tentang pengelolaan pajak. WP akan bilang percuma saya bayar pajak tapi dikorupsi, tidak berimbas ke penyediaan pelayanan publik. Di negara maju seperti Amerika, pemerintah mengenakan pajak sebesar 60 persen. Namun pajak tinggi itu ada dampak nyata ke pelayanan publik seperti penyediaan infrastruktur yang baik dan kesehatan gratis. Di Indonesia, pengelolaan pajak belum dirasakan masyarakat sehingga mereka cenderung tidak patuh membayar pajak.

Kedua yakni ketidaktahuan WP dalam melaporkan pajak. Ketidaktahuan itu membuat mereka menyerahkannya ke konsultan pajak. Namun

sayangnya, kadang konsultan tidak mengerti aturan sehingga melanggar hukum.

Kebanyakan pengemplang pajak tidak melaporkan penghasilannya dengan membuat faktur pajak fiktif. WP melakukan penjualan tapi tidak dimasukkan dalam laporan keuangan, dianggap tidak ada transaksi. Semakin ketat aturan, maka WP semakin berupaya untuk merendahkan jumlah pajaknya. Sebenarnya ada cara menyiasati pajak, ada ilmunya di tax planning, tetap membayar pajak lebih rendah tanpa melanggar hukum.

Tawar menawar dengan oknum pajak pun kadang dilakukan. Kalau kasus Gayus (terpidana mafia pajak), tawar menawar di level pengadilan pajak. WP tidak mau bayar kekurangan pajak sehingga banding di pengadilan pajak dan akhirnya menang dengan bantuan jaringan mafia Gayus. (tim)

Klien Saya...

■ DARI HALAMAN 1

karena wajib pajak bisa bayar utang di bank, maka dianggap perhitungan sendiri," katanya kepada *Tribun Jateng*, dengan nada tinggi.

Ditemui *Tribun* di rumahnya, pekan lalu, Sandi mengatakan perhitungan itu sangat tidak masuk akal. Baginya, seseorang me-

minjam uang bank berarti penghasilannya berkurang untuk mencicil. Bukan malah penghasilannya bertambah.

Ia pun punya beberapa klien baik perseorangan ataupun perusahaan yang meminjam uang bank karena beberapa alasan. Ada yang meminjam ratusan juta ru-

piah untuk pengobatan orangtuanya hingga ke Singapura. Ternyata terdeteksi hingga Kantor Imigrasi. Tidak hanya itu, ada yang meminjam uang bank karena butuh suntikan modal karena perusahaannya goyah. "Ada klien saya yang bilang rumah digadaikan asal orangtua sembuh tidak masalah. Ehh, malah diitung pajak," ucapnya.

Tidak hanya itu, proses jual beli tanah misalnya, juga jadi objek perhitungan pajak tersendiri. Padahal proses jual beli tanah sudah terkena berbagai macam pajak. "Masih banyak hal lain yang membuat kami pusing. Beneran, tahun ini banyak pengusaha yang teriak. Semoga tahun depan tidak ada tahun pembinasan," tuturnya. (tim)

Agnez Bilang...

■ DARI HALAMAN 1

itu juga dihadiri Ketua DPD RI Imman Gusman serta istri dan anak Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Shinta Wahid dan Yenny Wahid.

Aksi tersebut diikuti sekitar 1.000 orang, dan dilakukan untuk memperingati Hari Perdamaian Dunia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-bangsa tiap 21 September. Yenny Wahid selaku Direktur the Wahid Institute, mengatakan pentingnya menyuarakan kedamaian lewat cara-cara yang kreatif.

"Musuh utama kita adalah apatisme, rasa takut dan cuek. Padahal ini adalah masalah kita semua," ujarnya.

Yenny juga mengungkapkan keinginannya agar masyarakat Indonesia bisa lebih menyebarkan pesan perdamaian ketimbang pesan kebencian. Yenny menyoroti maraknya aksi bully dan pesan penuh kebencian yang mudah sekali tersebar melalui media sosial. "Kita lihat melalui media sosial

banyak sekali pesan-pesan penuh kebencian yang disebarkan. Itu banyak sekali jumlahnya. Orang provokasi kita dengan membuat pesan yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya," ujar Yenny.

Yenny mengatakan, tindakan menebar kebencian tersebut bahkan sudah berlangsung semakin sistematis dan radikal. Oleh karena itu, upaya untuk melawannya harus dilakukan secara masif dan sistematis pula.

Melalui acara peringatan ini, dia ingin mengajak

masyarakat untuk lebih banyak menyebarkan pesan perdamaian di media sosial. "Kita ingin melakukan juga langkah menyebar kedamaian secara terkoordinir. Kita ajak masyarakat untuk mau ikut andil menyebarkan pesan perdamaian minimal di lingkungan terdekat mereka," ujar Yenny. "Karena media sosial itu harusnya penuh dengan pesan cinta. Jadi, buat kami, itu hal sederhana yang bisa dilakukan saat ini," ucapnya. (kompas.com)

Tubuh Kombes...

■ DARI HALAMAN 1

ting dari trail dan masuk ke dalam jurang. "Beliau il. "Sering bersama-sama polisi lainnya untuk menyalurkan